

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI A PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota berkewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109, Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593) ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
2005 tentang Pedoman
Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2002
tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2002 Nomor
4 Seri D) ;
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004
tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor
4 Seri D) ;
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 5 Seri E) ;

25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri A) ;
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 4 Seri A) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan
WALIKOTA BOGOR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.**

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 berupa laporan keuangan terdiri atas :

- a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.
- b. Neraca Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2006 dan 2005.

- c. Laporan Arus Kas Tahun 2006.
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Keuangan terdiri atas :

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp. 536.012.125.796,00
b.	Belanja	<u>Rp. 507.874.855.144,00</u>
	Surplus	Rp. 28.137.270.652,00
c.	Pembiayaan :	
	- Penerimaan	Rp. 53.260.889.567,00 - Pengeluaran
	Rp. 9.316.242.977,00

	Surplus	Rp. 43.944.646.590,00

Pasal 3

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 1.992.752.073,42 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 534.019.373.722,58
b.	Realisasi	Rp. 536.012.125.796,00
	Selisih lebih	<u>Rp. 1.992.752.073,42</u>

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 60.250.710.392,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 568.125.565.536,00
b.	Realisasi	<u>Rp. 507.874.855.144,00</u>
	Rp. 60.250.710.392,00

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus sejumlah Rp. 15.807.375.938,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Defisit setelah perubahan	Rp. 43.944.646.590,00
----	---------------------------	-----------------------

b. Realisasi Rp. 28.137.270.652,00

Selisih lebihRp. 15.807.375.938,00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1) Anggaran setelah perubahan Rp.
53.260.889.567,00

2) Realisasi Rp. 53.260.889.567,00

Selisih Lebih / (kurang) Rp. ,00 b.

Pengeluaran :

1) Anggaran setelah perubahan Rp. 9.316.242.977,00

2) Realisasi Rp. 9.316.242.977,00

Selisih Lebih / (kurang) Rp. 0,00

Pasal 4

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva Rp. 3.098.200.941.605,94

b. Jumlah Utang Rp. 0,00

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 3.098.200.941.605,94

Pasal 5

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp. 34.888.722.265,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 2 Januari 2006 Rp. 34.888.722.265,00

b. Jumlah penerimaan kas Rp. 554.384.293.098,00

Rp.

589.273.015.363,00

- c. Jumlah pengeluaran kas
d. Saldo Kas 31 Desember 2006

Rp. 517.977.928.967,00
Rp. 71.295.086.396,00

Pasal 6

(1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang meliputi :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II : Neraca
3. Lampiran III : Laporan Arus Kas
4. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan :

- a. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor
- b. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor

Pasal 7

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada
tanggal 28 September 2007

WALIKOHA BOGOR,

t.t.d

DIANI BUDIARHO

Diundangkan di Bogor pada
tanggal 28 September 2007

SEKREHARIS DAERAH KOHA BOGOR,

t.t.d

DODY ROSADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN
2007 NOMOR 2 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni

